BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak terhadap suatu objek yang didalamnya mengandung beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Hal ini juga berkaitan dengan teori *Zoon Politicon* yang diungkapkan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip dari Sudarsono bahwa "manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya".¹ Kondisi ini yang menyebabkan antara manusia dengan manusia yang lain sering terikat dalam suatu perjanjian, bahkan perjanjian yang dilakukan juga dapat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian memiliki banyak makna atau pengertian, sebagaimana pendapat R. Subekti mengenai perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian yang dilakukan dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur, janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk tertulis.²

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 209.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008). 1.

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian terjadi antara satu orang atau lebih yang saling terikat dalam suatu hal. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga disebut dengan perikatan. Menurut Salim bahwa "perikatan terbentuk atas dua hal, yakni perjanjian dan perikatan dari undang-undang, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya saling terikat, sehingga perjanjian ialah sumber perikatan".³

Perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Hal ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kewajiban ini juga harus dipenuhi, sehingga tercipta perjanjian yang baik.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai empat syarat agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah, diantaranya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 27.

Dari empat syarat tersebut, maka syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah.⁴ Selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih juga terbagi dalam dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Menurut Salim bahwa "perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak".⁵ Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada perjanjian secara lisan, karena perjanjian secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan alasan lebih mudah dan praktis.

Perjanjian secara lisan banyak digunakan oleh masyarakat terutama dalam hal hutang piutang. Hutang piutang ini memiliki pengertian yang sama dengan pinjam meminjam, dimana dalam Pasal 1754 KUHPerdara diatur bahwa "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. 16.

⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengambil sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Dasar dilakukannya perjanjian lisan dalam hutang piutang ini adalah rasa kepercayaan antara pemberi hutang (kreditur) dan penerima hutang (debitur). Pada hal ini, pemberi hutang percaya bahwa penerima hutang akan membayar hutang sesuai dengan perjanjian lisan yang dilakukan. Pada dasarnya perjanjian secara lisan dalam masalah hutang piutang sah-sah saja untuk dilakukan asal memenuhi syarat perjanjian dalam KUHPerdara, karena di dalam KUHPerdara tidaklah mewajibkan suatu perjanjian harus tertulis. Artinya perjanjian secara lisan juga sebenarnya sah untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak merugikan salah satu pihak.

Akan tetapi, perjanjian secara lisan dalam hal hutang piutang yang sering terjadi banyak menimbulkan dampak negatif terutama dampak terhadap pemberi hutang (kreditur). Hal ini dikarenakan dari perjanjian lisan tersebut, banyak debitur yang merasa bahwa perjanjian akan sulit dibuktikan karena tidak ada bentuk tertulis, sehingga banyak penerima hutang (debitur) yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Artinya perjanjian secara lisan dalam hutang piutang memberikan dampak berupa terjadinya wanprestasi atau ingkar janji karena pengembalian uang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah

diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶ Meskipun perjanjian secara lisan diperbolehkan, namun dalam kasus wanprestasi hutang piutang yang dilakukan melalui perjanjian lisan ini akan sulit untuk dibuktikan, mengingat tidak ada bukti otentik mengenai perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak dapat dengan mudah mengingkari perjanjian tersebut.

Dalam kenyataannya banyak peristiwa perjanjian utang piutang secara lisan banyak yang mengingkarinya. Karena aturan hukum tentang perjanjian utang piutang tidak dipahami oleh sebagian besar warga masyarakat khususnya di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini, utang piutang merupakan hal yang lazim dan sudah biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat. Utang piutang yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi bahwa dalam pelaksanaan hutang piutang di sini hanya terdapat sebuah perjanjian yang berlandaskan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak serta hanya dilakukan dengan lisan saja. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut karena tidak ingin merusak hubungan baik di antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 1.

tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.

Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain. Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ketika seseorang berutang lebih dari Rp2.000.000 menggunakan sebuah jaminan, tetapi jika kurang dari Rp 2.000.000; tidak adanya jaminan hanya saja kepercayaan lisan.

Salah satu permasalahan terkait perjanjian yang sering kali dijumpai di masyarakat ialah mengenai perjanjian hutang piutang. Pada umumnya perjanjian akan lancar tanpa ditemukan hambatan bila pihak yang ada pada pelaksanaan perjanjian tersebut didasarkan itikad yang baik serta kewajibannya dilaksanakan sesuai yang sudah disepakatkan diawal kesepakatan. Akan tetapi, jika dalam pelaksanaan perjanjian didapati pihak yang tidak memenuhi kesepakatan, maka akan terjadinya wanprestasi.

Terkait wanprestasi ini, di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sendiri terdapat 3 (tiga) kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan. Pada awalnya perjanjian hutang

piutang yang terjalin antara kedua belah pihak berjalan baik, akan tetapi setelah beberapa bulan peminjam tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran/pelunasan utang.

Sehubungan dengan hal di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan Akibat Hukumnya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang secara lisan yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang secara lisan yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara lebih rinci manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum perdata terutama dalam pelaksanaana perjanjian yang bersifat lisan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa maupun masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari judul yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga

suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁷

2. Hutang Piutang

Hutang piutang terdiri dari 2 kata, sehingga pengertiannya juga dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu pengertian hutang dan pengertian piutang. Menurut Siti Kholifah hutang piutang dapat diartikan sebagai berikut:

Hutang atau biasa disebut dengan utang merupakan uang tunai atau non tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain, sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam.⁸

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.⁹

3. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.¹⁰ Perjanjian lisan adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan, dimana perjanjian lisan ini juga memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹

⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,” Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2008), 39.

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang, Perjanjian Piutang* (Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

⁹ Lina Shabrina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing,” *Law, Development and Justice Review* 4, no. 2 (2022), 299. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.13582>.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.2 (Bandung: Alumni, 1986). 3.

¹¹ *Ibid.* hlm. 4

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan sepakat adalah pernyataan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih maupun badan hukum dengan pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “sesuai” adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Sehubungan dengan adanya persesuaian antara kehendak dengan pernyataan seperti yang telah dijelaskan diatas, adakalanya pernyataan yang timbul tidak sesuai dengan kehendak yang ada dalam batin. Mengenai hal ini terdapat teori yang dijadikan pemecahannya, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi.
- b. Teori Pernyataan (*verklarungstheorie*), kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadinya

perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

- c. Teori Kepercayaan (*vertouwenstheorie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.¹²

Dalam Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Adapun maksud dari rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu;

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah ditentukan secara cepat.

- b. Berbuat sesuatu;

Pada perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu, dalam pandangan KUH Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitor) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak berwujud.

- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987). 57.

untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.¹³

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam literatur, teori persengketaan juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹⁴ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.”¹⁵

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 155.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 82.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 57.

3. Strategi dalam penyelesaian konflik.¹⁶

Menurut Rahmadi berpendapat bahwa: “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan”.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

a. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nungroho bahwa, negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁸

¹⁶ H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Ed. 1; Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 1.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Edisi ke-1 (Jakarta: Clarendon Press, 2004). 21.

b. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasiliator.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

d. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui

pihak ketigaserta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan secara hukum dinyatakan sah, asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya terjamin. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai pembuktian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan secara normatif atau tidak berfokus pada satu kasus, sedangkan pada penelitian ini dilakukan secara empiris dan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan serta akibat hukumnya.

2. Penelitian dengan judul "Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan". Hasil dari penelitian ini adalah suatu perjanjian lisan sah digunakan apabila persyaratannya sesuai dengan Pasal 1320 KUHP. Hal ini menyebabkan suatu perjanjian secara lisan dapat dijadikan sebagai alat bukti dihadapan persidangan apabila didukung dengan alat bukti yang sah dan memadai didalam penerapannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah suatu perjanjian secara lisan dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dihadapan persidangan apabila diperkuat dengan alat bukti lainnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai pembuktian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan secara normatif atau tidak berfokus pada satu kasus, sedangkan pada penelitian ini dilakukan secara empiris dan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan serta akibat hukumnya.
3. Penelitian dengan judul penelitian "Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Dovia dan Ibu Siti di Kayu panglong Bapak Tugiman. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip Hukum Perikatan Islam yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara

kreditur dan debitur dengan kesepakatan. Bapak Dovia harus menyerahkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan, dan Ibu Siti harus membuatkan lemari bufet kayu jati kepada Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu, dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Serta Bapak Febri pemilik kayu panglong yang mengikhlaskan utang Bapak Supar dan Bapak Teguh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti bukan hanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, tapi penelitian terdahulu juga lebih fokus pada Perspektif Hukum Perikatan Islam.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 134.

pada ketentuan yang normatif mengenai perjanjian utang piutang secara lisan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan penulis mengetahui wilayah tersebut serta banyak terjadi perjanjian utang piutang secara lisan.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX.

2) Sumber Data

Sumber data adalah data yang langsung berkaitan dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan belum diolah datanya. Dalam penelitian ini sumber informasi

didapatkan dari observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu sumber data yang berasal dari dokumen atau arsip pencatatan yang memberikan informasi tentang perjanjian utang piutang secara lisan.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dapat dipergunakan oleh penulis seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan cara *purposive sampling*, dimana yang menjadi responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu dianggap mengetahui semua hal yang diteliti serta dapat mewakili semua populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 15 (lima belas) orang yang melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan pada tahun 2021-2023. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala Desa Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam

- 2) 5 (lima) orang masyarakat Desa Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam yang melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX.

2) Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap

muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif, baik itu data primer maupun data sekunder. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dengan kenyataan tentang pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX dan akibat hukumnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian dan tinjauan umum tentang utang piutang. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, akibat suatu

perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian utang piutang, pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi.

Bab III Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Bab ini menguraikan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang secara lisan yang terjadi di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Bab IV Penutup. Pada bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.